

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada pasal 89 ayat (1) Permendagri ini menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.

Dilatarbelakangi oleh amanat dari regulasi tersebut, maka SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko menyusun Rencana Strategis Kantor Lurah Pasar Bangko tahun 2014-2018. Renstra ini dibuat dan ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2014.

Rencana Strategis ini sendiri merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan target-target secara indikatif yang ingin dicapai dan akan menjadi acuan bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko tahun 2014-2018 memberikan gambaran-gambaran terhadap, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif untuk 5 tahun kedepan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Renstra Kantor Lurah Pasar Bangko dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kelurahan Pasar Bangko untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Lurah Pasar Bangko bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Tiang Pumpung dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

1.3. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Kantor Lurah Pasar Bangko Tahun 2014-2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Ddalam Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014 nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018;
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 25).

1.4. HUBUNGAN RENSTRA KANTOR LURAH PASAR BANGKO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014 -2018 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2014 – 2018.

Renstra SKPD Tahun 2014 – 2018 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra Kantor Lurah Pasar Bangko dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistimatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Merangin dan

Wakil Bupati Merangin

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034

3.4. Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kantor
Lurah Pasar Bangko

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Kantor Lurah Pasar
Bangko

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN
SASARAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KANTOR LURAH PASAR BANGKO

Regulasi Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kelurahan didasarkan kepada *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan*, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah mempunyai tugas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga menjelaskan fungsi Lurah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Dari uraian tugas-tugas Lurah yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Merangin yang direvisi kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 tahun 2008, tercantum bahwa tugas pokok Lurah adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan dan pelayanan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pembinaan lembaga masyarakat Kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

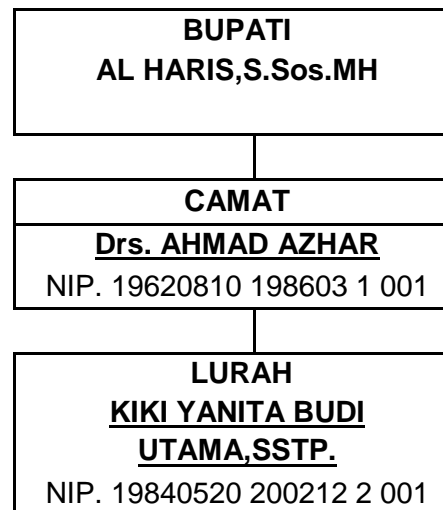
Tabel 1: Matrik Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Seksi Kantor Lurah Pasar Bangko

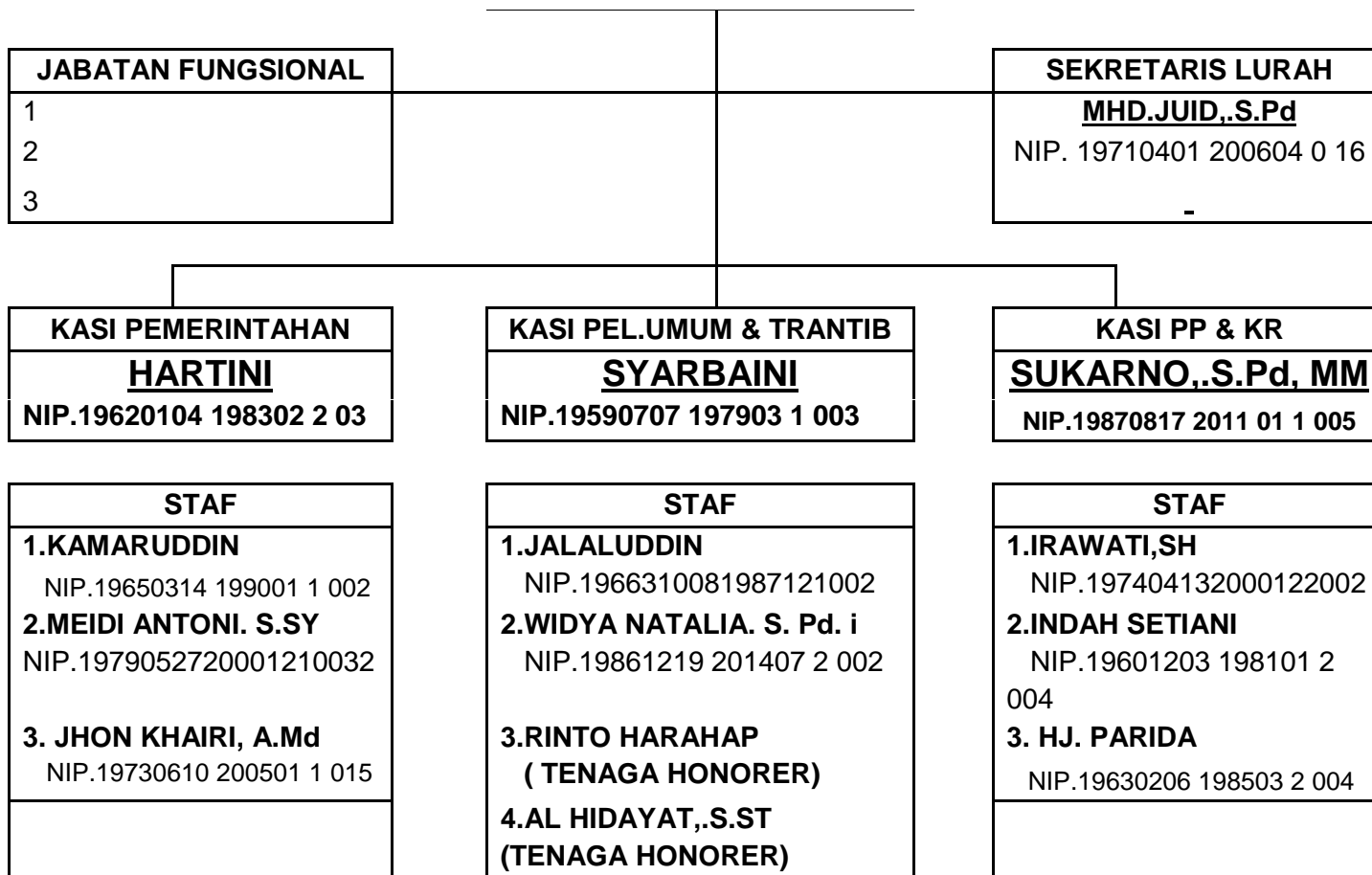
No	STRUKTUR	TUGAS POKOK	FUNGSI
1.	Sekretariat	Membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan KeLurahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur KeLurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di tingkat Kelurahan; b. Pelayanan administrasi keuangan; c. Pelayanan tata usaha, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2.	Seksi Pemerintahan	Membantu tugas Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan; b. Pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan; c. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan social politik, Idiologi Negara/Kesatuan Bangsa;

3.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa/Kelurahan	Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan perkonomian masyarakat kelurahan; b. Pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan; c. Pelaksanaan Pembangunan baik yang bersumber dari Kelurahan maupun Pemerintah; d. Pembinaan terhadap masalah social, kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.	Seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelayanan Umum	Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman ,ketertiban dan pelayanan umum; b. Penyelenggaraan pengawasan ketertiban pasardi Kelurahan; c. Penyelenggaraan ketertiban Pemilu d. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum,pembinaan kekayaan dan inventarisasi aset kelurahan;

			<p>e. Penyelenggaraan kegiatan kebersihan,keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan</p> <p>f. Penyelenggaraan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	--	--

GAMBAR 1 : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LURAH PASAR BANGKO BERDASARKAN PERDA KABUPATEN MERANGIN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MERANGIN





JABATAN FUNGSIONAL
1
2
3

SEKRETARIS LURAH
<u>MHD.JUID,.S.Pd</u>
NIP. 19710401 200604 0 16
-

KASI PEMERINTAHAN
<u>HARTINI</u>
NIP.19620104 198302 2 03

KASI PEL.UMUM & TRANTIB
<u>SYARBAINI</u>
NIP.19590707 197903 1 003

KASI PP & KR
<u>SUKARNO,.S.Pd, MM</u>
NIP.19870817 2011 01 1 005

STAF
1.KAMARUDDIN NIP.19650314 199001 1 002
2.MEIDI ANTONI. S.SY NIP.1979052720001210032
3. JHON KHAIRI, A.Md NIP.19730610 200501 1 015

STAF
1.JALALUDDIN NIP.1966310081987121002
2.WIDYA NATALIA. S. Pd. i NIP.19861219 201407 2 002
3.RINTO HARAHAPE (TENAGA HONORER)
4.AL HIDAYAT,.S.ST (TENAGA HONORER)

STAF
1.IRAWATI,SH NIP.197404132000122002
2.INDAH SETIANI NIP.19601203 198101 2 004
3. HJ. PARIDA NIP.19630206 198503 2 004

2.2. SUMBER DAYA SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO

Sumber daya SKPD memberikan gambaran tentang kondisi sumberdaya manusia dan kondisi sumber daya asset/modal yang dimiliki oleh SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko saat ini yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko.

Adapun kondisi sumber daya manusia Kantor Lurah Pasar Bangko terdiri dari personil PNS dan non PNS (Tenaga Kontrak) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Personil Pegawai Negeri Sipil Kantor Lurah Pasar Bangko Kondisi Tahun 2014

No	Nama	Pangkat	Jabatan
		Golongan	Nama
1	2	4	6
1	KIKI YANITA BUDI UTAMA, S.STP	PENATA TK I (III/D)	LURAH
2	MUHD.JUID, .S.Pd	PENATA MUDA (III/b)	SEKLUR
3	HARTINI	PENATA MUDA (III/c)	KASI PEMERINTAHAN
4	SYARBAINI	PENATA MUDA (III/a)	KASI TRANTIB DAN PELUM
5	SUKARNO PUTRA, .S.Pd. MM	PENATA MUDA (III/a)	KASI PP&KR
6	IRAWATI,SH	PENATA MUDA TK.1 (III/d)	STAF
7	HJ. PARIDA	PENATA (III/c)	STAF
8	KAMARUDIN	PENATA MUDA (III/a)	STAF
9	JHON KHAIRI, .A. Md	PENATA MUDA	STAF

		(III/a)	
10	INDAH SETIANI	PENGATUR (II/d)	STAF
11	JALALUDDIN	PENGATUR (II/c)	STAF
12	MEIDI ANTONI,S.Sy	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF
13	WIDIYA NATHALIA	JURU (I/c)	STAF
14	RINTO HARAHAHAP	- -	STAF
15	AL HIDAYAT, .S.ST	- -	STAF

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko Tahun 2014

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	5
3	SMA/SMK/MA	8
4	SMP/MTs	1

Disamping sumberdaya personil, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD Kantor Lurah Pasar Bangko juga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang telah tersedia saat ini adalah dalam bentuk asset/modal yang telah dimiliki. Untuk melihat kondisi asset/modal Kantor Lurah Pasar Bangko dapat dilihat pada tabel neraca asset Tahun Anggaran 2014 di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KELURAHAN PASAR BANGKO
NERACA KOMPARATIF
PER 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2014	2013
1	2	3	4
1	ASET		
2	Aktiva Lancar	0,00	0,00
3	Kas di Bank		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Piutang Pajak		
7	Piutang Retribusi		
8	Piutang Lainnya		
9	Persediaan		
10	Jumlah Aktiva Lancar (3 s.d 9)	0,00	0,00
11	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
12	Investasi Non Permanen Lainnya		
13	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
14	Jumlah Investasi Jangka Panjang (12 s.d 13)	0,00	0,00
15	Aset Tetap	405.113.000,00	285.021.000,00
16	Tanah	0,00	0,00
17	Peralatan dan Mesin	116.596.000,00	106.416.000,00
18	Gedung dan Bangunan	285.517.000,00	178.605.000,00
19	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.000.000,00	
20	Aset Tetap Lainnya		
21	Konstruksi dalam Pengerjaan		
22	Jumlah Aset Tetap(16 s.d 21)	405.113.000,00	285.021.000,00
23	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
24	Aset Tak Berwujud		
25	Aset Lain-lain		
26	Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
27	JUMLAH ASET (10+14+22+26)	405.113.000,00	285.021.000,00
28	KEWAJIBAN	0,00	0,00
29	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
30	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		
31	Hutang Jangka Pendek Lainnya		
32	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (30 s.d 31)	0,00	0,00
33	JUMLAH KEWAJIBAN (32)	0,00	0,00
34	EKUITAS DANA	0,00	0,00
35	Ekuitas Dana Lancar	0,00	0,00
36	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00
37	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00
38	Cadangan Piutang	0,00	0,00
39	Cadangan Persediaan	0,00	0,00
40	Cadangan Yang disediakan untuk		

41	Pembayaran		
	Hutang Jangka Pendek		
42	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (36 s.d 41)	0,00	0,00
43	Ekuitas Dana Investasi	405.113.000,00	285.021.000,00
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka		
44	Panjang	0,00	0,00
45	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	405.113.000,00	285.021.000,00
46	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00	0,00
47	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (44 s.d 46)	405.113.000,00	285.021.000,00
48	JUMLAH EKUITAS DANA (42+47)	405.113.000,00	285.021.000,00
49	JUMLAH EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN (33+48)	405.113.000,00	285.021.000,00

Tabel 5 : Neraca Asset Komparatif Kantor Lurah Pasar Bangko Per 31 Desember 2014 dan 2013

Sumber : Laporan Keuangan Kantor Lurah Pasar Bangko Tahun Anggaran 2013

Dari tabel neraca asset di atas tergambar bahwa nilai total investasi yang berwujud asset atau modal sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.427.091.776,- (*empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*), dari nilai asset tersebut 100% merupakan asset tetap yang terdiri dari asset tanah, asset peralatan dan mesin, serta asset gedung dan bangunan

Dengan gambaran kondisi nilai asset yang dimiliki tersebut, maka dapat diambil satu kongklusi bahwa Kantor Lurah Pasar Bangko memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja yang masih minim, sehingga kedepan perlu dialokasikan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung kerja khususnya penambahan asset gedung dan bangunan, serta penambahan asset peralatan dan mesin.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Lurah Pasar Bangko sebagai berikut :

1. MOTOR : 3 UNIT
2. KOMPUTER PC : 3 UNIT
3. LAPTOP : 2 UNIT
4. NOTEBOOK : 1 UNIT
5. MEJA KERJA/MEJA RAPAT : 14 BUAH
6. MEJA PANJANG : 2 BUAH
7. KURSI KERJA/KURSI PUTAR : 2 BUAH
8. KURSI TAMU/SOFA : 1 SET
9. KURSI RAPAT/KURSI PLASTIK : 87 BUAH
10. LEMARI : 3 BUAH

11. BUFET	: 1 BUAH
12. FILLING KABINET	: 3 BUAH
13. RAK ARSIP	: 1 BUAH
14. PRINTER	: 2 UNIT
15. TELEVISI	: 1 UNIT
16. RECIPER PARABOLA	: 1 UNIT
17. PENYEDIAAN PERALATAN PERLANGKAPAN KANTOR	: 1 PAKET
18. PAPAN DATA PKK	: 1 PAKET
19. AC	: 2 UNIT
20. HANDYCAM	: 1 UNIT
21. MESIN RUMPUT	: 1 UNIT
22. INFOKUS	: 1 UNIT
23. WIFI	: 1 UNIT
24. PAPAN MEREK KANTOR	: 1 PAKET
25. KULKAS	: 1 UNIT
26. GORDEN	: 1 PAKET
27. PAPAN STRUKTUR	: 1 BUAH
28. PAPAN DUK	: 1 BUAH
29. JAM DINDING	: 1 BUAH
30. KIPAS ANGIN	: 2 BUAH
31. FOTO PRESIDEN	: 1 BUAH
32. FOTO WAKIL PRESIDEN	: 1 BUAH
33. TONG SAMPAH	: 100 BUAH

2.3 KINERJA PELAYANAN KELURAHAN PASAR BANGKO

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Pasar Bangko pada Tahun Anggaran 2014, dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1 berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya jenis dukungan operasional kerja	10	10	100
2.	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja	50%	50%	100
	- Peralatan dan mesin	40%	40%	100
	- Gedung dan bangunan			
3.	Meningkatnya Disiplin aparatur Kelurahan	15	15	100
4.	Jumlah Personil aparatur Kelurahan yang mendapat kesempatan mengikuti Bintel/Pelatihan	1	1	100

5.	Tersedianya dokumen perencanaan dan Laporan kinerja: - RKA/DPA - Laporan Tahunan	3	3	100
6.	Tercapainya target wajib pajak yang membayar PBB	21.041.176	10.751.029	100
6.	Tersedianya dokumen usulan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	1	1	100
7.	Terfasilitasinya PKK dalam melaksanakan kegiatan	4	4	100
8.	Tersedianya keakuratan data profil Kelurahan	1	1	100
9.	Terfasilitasi kegiatan Posyandu	2	2	100
10.	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	1	100

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)) tentang kondisi dan potensi lingkungan

TABEL 1

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

NO	KEKUATAN (STRENGTH)	NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1.	Adanya Peraturan/Keputusan Walikota tentang tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah.	1.	Terbatasnya kewenangan Lurah dalam melaksanakan tugas.
2.	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Kelurahan.	2.	rendahnya produktifitas SDM aparatur.
3.	Tersedianya sarana dan Prasarana dan sarana yang	3.	Belum maksimalnya koordinasi antar dan dari lintas sektoral.
		4.	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Manusia yang tersedia

memadai		
---------	--	--

TABEL II

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

NO	PELUANG (OPPORTUNITY)	NO	ANCAMAN (THREAT)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban	1.	Adanya tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2.	Kondisi ekonomi yang kurang merata;

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, maka didapatkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

a. Strategi SO

Kekuatan yang dimiliki harus didayagunakan secara optimal untuk meraih peluang-peluang yang ada. Adapun Strategi SO Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Pasar Bangko adalah sebagai berikut:

Memberdayakan personil dan sarana & prasarana yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk secara intensif dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

b. Strategi ST

Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala ancaman yang mungkin berupa kendala dan tantangan. Adapun Strategi ST Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut:

Terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan SDM aparatur untuk memaksimalkan kinerja aparat dalam melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Strategi WO

Mengatasi segala kelemahan untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang

yang ada. Adapun Strategi WO Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut:

Meningkatkan SDM aparatur sehingga memiliki motivasi, inovasi, dan daya kreatif yang tinggi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

d. Strategi WT

Meminimalisasi kelemahan untuk mengatasi segala ancaman. Adapun Strategi WT Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas aparatur dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memaksimalkan potensi wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah strategi berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas Aparatur dalam pelayanan masyarakat.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.1 Kebijakan

Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2014-2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kelurahan Pasar Bangko untuk kecepatan dan kenyamanan layanan ;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Membuat data kelurahan yang akurat

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO

Dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pelayanan Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko dilakukan analisa dari kondisi internal yang dilihat dari aspek Sumber daya manusia yang tersedia, Asset/Modal yang tersedia dan kondisi pengelolaan keuangan SKPD, dan analisa kondisi eksternal yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko. Adapun hasil identifikasi permasalahan yang muncul dari analisa kondisi internal dan eksternal dapat dilihat pada matrik analisa di bawah ini.

Tabel 10 : Matrik Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan SKPD Berdasarkan Tugas dan Fungsi KANTOR LURAH PASAR BANGKO

No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
KONDISI INTERNAL			
1.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah peronil Aparatur Kelurahan terdiri dari 13 orang PNS dan 2 orang Non PNS personil PNS KANTOR LURAH PASAR BANGKO yang memiliki kapabilitas dengan kategori baik hanya 1 (satu) orang atau 12,5%, kategori cukup sebanyak 4 (empat) orang atau sebesar 50%, dan yang memiliki kategori kurang sebanyak 3 (tiga) orang atau sebesar 37,5%. dari 10 (sepuluh) orang personil staf PNS tersebut, 5 (lima) orang memiliki semangat dan kemauan belajar yang cukup tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya personil Aparatur Kelurahan khususnya personil staf pelaksana PNS Minimnya kesempatan personil Aparatur Kelurahan untuk mengikuti bintek, diklat/pelatihan. Masih rendahnya pemahaman pejabat structural Kantor Lurah Pasar Bangko terhadap system pengendalian intern SKPD
2.	Asset/Modal	<ol style="list-style-type: none"> nilai total investasi yang berwujud asset atau modal sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.427.091.776,- 	<ol style="list-style-type: none"> Masih Minimnya sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur Kelurahan yang tersedia
3.	Pengelolaan Keuangan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> Angka rata-rata pertumbuhan Anggaran sebesar 61,47% Rasio realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami fluktuasi 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam penatausahaan keuangan belum menggunakan system informasi keuangan, sehingga memperlambat penyelesaian laporan akuntansi keuangan. yang mengakibatkan

No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
			<p>keterlambatan pencairan dana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Masih minimnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap peraturan tentang standar akuntansi pengelolaan keuangan. 3. Masih minimnya pemahaman pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat memperlambat penyelesaian SPJ. 4. Pengarsipan dokumen-dokumen keuangan yang tidak tertib dikarenakan minimnya sarana pengelolaan arsip keuangan yang tersedia.
KONDISI EKSTERNAL			
	pemberdayaan masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin ketatnya pengawasan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga dapat mendorong proses perencanaan pembangunan yang lebih baik. 2. Adanya peluang Kelurahan untuk melaksanakan fasilitasi terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berjalannya mekanisme proses perencanaan pembangunan dari tingkat Kelurahan sampai Kabupaten sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun untuk melaksanakan dan mengikuti proses perencanaan ; 2. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara detail tentang proses perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodasi muatan local. 3. Terbatasnya akses informasi program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh unit kerja lain

No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
			4. Menurunnya semangat kegotongroyongan masyarakat.
	penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan komunikasi Kelurahan dengan unsur berbasis kinerja yang sangat baik 2. Telah terbentuknya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKDM) tingkat Kelurahan 3. Telah Terbentuknya Lembaga Adat Kelurahan 4. Masih berperannya Lembaga Adat di tengah masyarakat Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 2. Harga komoditas karet dan sawit yang tidak stabil sehingga mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi rumah tangga yang akan berdampak kepada kondusifitas keamanan dan ketertiban 3. Belum optimalnya forum kerukunan antar umat beragama (FKDM) di tingkat Kelurahan
	pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara prasarana dan fasilitas umum 2. Tidak adanya unit kerja SKPD teknis yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 3. Luasnya jangkauan SKPD Teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
	penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan		Masih kurangnya pemahaman SKPD lingkup Kabupaten terkait dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Lurah yang berdampak kepada belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi

1.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI MERANGIN DAN WAKIL BUPATI MERANGIN

Visi dan misi Bupati Merangin dan Wakil Bupati Merangin merupakan gambaran dari janji politik pada saat pilkada yang kemudian gambarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Merangin di Dalam dokumen perencanaan dimaksud adalah “***BERBENAH menuju Merangin EMAS***”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAHAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan penjabaran operasionalisasi untuk mencapai visi tersebut. Adapun misi yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
 2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
 3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
 4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
 5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
-

6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk menderivasi misi ini menjadi operasionalisasi yang dilaksanakan oleh Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap permasalahan pelayanan SKPD, factor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin. Dari hasil FGD pada forum SKPD telah dipetakan permasalahan, factor hambatan dan factor pendorong pada masing-masing program di dalam RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko sebagaimana tergambar pada matrik di bawah ini.

Tabel 11: Matrik Penelaahan Visi, Misi dan Program pada dokumen RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2014-2018

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	MISI 1: Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektivitas Dan Akuntabilitas			
I.1	Urusan Wajib Kepegawaian dan Persandian			
	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya personil Aparatur Kelurahan khususnya personil staf pelaksana PNS Minimnya kesempatan personil Aparatur Kelurahan untuk mengikuti bintek, diklat/pelatihan. Masih rendahnya pemahaman pejabat structural KANTOR LURAH PASAR BANGKO terhadap system pengendalian intern SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa penempatan staf PNS di setiap SKPD merupakan kewenangan BKD dan Baperjakat Pengalokasian Anggaran SKPD Kelurahan yang masih minim, sehingga menyebabkan pembiayaan untuk bintek dan diklat bagi Aparatur Kelurahan terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya trend peningkatan alokasi Anggaran bagi SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO. Adanya komitmen Pengambil keputusan untuk melakukan penataan Kelurahan
	2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Masih Minimnya sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur Kelurahan yang tersedia	Pengalokasian Anggaran SKPD Kelurahan yang masih minim sehingga menyebabkan alokasi belanja modal/investasi untuk menyediakan sarana dan prasaran pendukung kerja sangat terbatas	<ol style="list-style-type: none"> Adanya trend peningkatan alokasi Anggaran bagi SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO. Adanya komitmen Pengambil keputusan untuk melakukan penataan Kelurahan

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Masih rendahnya disiplin Aparatur Kelurahan	1. Para Pejabat structural SKPD KANTOR Lurah belum begitu memahami dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 2. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang SOP Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
I.2	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah			
	1. Program Penataan Administrasi Kelurahan.	Belum optimalnya penyelenggaraan Administrasi Kelurahan di SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO	1. Aparatur Kelurahan masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya. 2. Kemampuan Aparatur Kelurahan yang masih terbatas dalam melaksanakan tugasnya	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
	3. Program Penataan Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public di SKPD KANTOR LURAH PASAR BANGKO 2. Masih rendahnya masyarakat yang datang ke KANTOR Lurah untuk mendapatkan pelayanan	1. Aparatur Kelurahan masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya. 2. Masyarakat masih belum memahami pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh SKPD KANTOR Lurah	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
	4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	1. Belum berjalannya evaluasi kinerja yang dilakukan oleh	1. Belum tersedianya Dokumen Rencana	1. Adanya kesempatan bagi pengelola

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	keuangan	<p>SKPD KANTOR Lurah secara mandiri.</p> <p>2. Belum optimalnya penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD</p>	<p>Strategis (Renstra) KANTOR Lurah periode sebelumnya.</p> <p>2. Dalam penatausahaan keuangan belum menggunakan system informasi keuangan, sehingga memperlambat penyelesaian laporan akuntansi keuangan.yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.</p> <p>3. Masih minimnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap peraturan tentang standar akuntansi pengelolaan keuangan.</p> <p>4. Masih minimnya pemahaman pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat memperlambat penyelesaian SPJ.</p> <p>1. Pengarsipan dokumen-dokumen keuangan yang tidak tertib dikarenakan minimnya sarana pengelolaan arsip</p>	<p>keuangan dan peaksana kegiatan untuk mengikuti bintek dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja SKPD</p>

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			keuangan yang tersedia	
I.3	Urusan Wajib Pengawasan Pemerintahan Daerah			
	1. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kurang berjalannya pengendalian internal di SKPD KANTOR Lurah	1. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang SOP pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 2. Masih adanya Pejabat Struktural yang belum memahami tentang SPIP	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
I.4	Urusan Wajib Pustaka Data dan Dokumentasi Arsip			
	1. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.	Kurang berjalannya pengelolaan arsip di Kantor Lurah Pasar Bangko	1. Masih rendahnya pemahaman Aparatur Kelurahan tentang pengelolaan Arsip SKPD. 2. Tidak adanya tenaga Arsiparis di Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko	1. Adanya alokasi anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Arsip SKPD 2. Adanya kesempatan bagi Aparatur Kelurahan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan Arsip.
	2. Program Pengembangan Data dan Informasi	1. Belum terbangunnya database berbasis wilayah Kelurahan yang baik. 2. Belum berjalannya	1. Kurangnya tenaga personil Kelurahan untuk melakukan pendataan dan pengolahan data	1. Adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		<p>pemberian informasi kepada masyarakat secara online</p> <p>3. Belum terbangunnya website Kantor Lurah Pasar Bangko</p>	2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja yang disediakan.	kerja
I.5	Urusan Wajib Pelayanan Publik			
	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan			Amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan Kependudukan bersifat jemput bola
I.6	Program Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan yang dilaksanakan oleh petugas linmas Desa	<p>1. Belum adanya penunjukan petugas linmas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>2. Belum adanya alokasi anggaran untuk membiayai operasional petugas linmas</p> <p>3. Tidak stabilnya kondisi ekonomi masyarakat</p>	Penguatan Desa dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
	2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Masih rendahnya pemeliharaan kantrantibmas di desa	<p>1. Masih rendahnya rasio Poskamling di tingkat RT dan Lingkungan</p> <p>2. Masih rendahnya</p>	1. Koordinasi antara SKPD KANTOR Lurah dengan unsur Tripika yang cukup baik

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 3. Tidak stabilnya kondisi ekonomi masyarakat	
	3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	1. Menurunnya semangat kegotong-royongan masyarakat	1. Komunikasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Desa yang cukup baik 2. Penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
II	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR			
	-	-	-	-
III	MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini.	Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah pada tingkat anak usia Dini di Kelurahan Pasar Bangko	1. Kurangnya prasarana Gedung PAUD yang tersedia di Kelurahan Pasar Bangko 2. Kurangnya Pembiayaan untuk operasionalisasi PAUD	Adanya Kebijakan Pendidikan PAUD satu Atap dengan Sekolah Dasar (SD)
2	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Masih Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Kelurahan Pasar Bangko	1. Kurangnya upaya promosi dan sosialisasi kesehatan kepada Masyarakat. 2. Kurang berjalannya fungsi promosi dari instansi Puskesmas sebagai	Penurunan Angka Kematian Ibu dan anak adalah salah satu target MDGs

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			UPTD Kesehatan	
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Menurunnya semangat gotong royong masyarakat untuk membersihkan rumah dan lingkungannya secara mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal. 2. Belum berjalannya pengelolaan persampahan yang berbasis masyarakat 3. Penyediaan fasilitas sanitasi yang masih kurang 	Salah satu indicator dari sasaran target MDGs yang merupakan komitmen pemerintah
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam program KB/KR mandiri.	Tingginya Proporsi Penduduk Kabupaten Merangin tahun 2010 usia 0-14 tahun sebesar 30,7% yang disebabkan tingginya angka kelahiran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya upaya pembinaan dan fasilitasi terhadap masyarakat dalam program KB 2. Terbatasnya tenaga teknis penyuluh KB di Kelurahan 3. Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program KB. 4. SKPD Kelurahan hanya sebagai fungsi koordinasi 	Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan salah satu sasaran target MDGs
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
6	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak.	Masih kurangnya koordinasi SKPD KANTOR Lurah dengan Puskesmas sebagai Instansi	Terbatasnya personil Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan	Perkembangan anak usia dini menjadi prioritas Pembangunan SDM

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		teknis	fungsinya	Kabupaten Merangin
7	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	Tidak terpantaunya kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kelurahan Pasar Bangko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum jelasnya koordinasi SKPD Kelurahan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2. Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah Terbentuknya unit P2TP2A Tingkat Kabupaten Merangin
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Factor social budaya masyarakat yang masih berkarakter agraris 2. Terbatasnya personil dan pemahaman aparatur Kelurahan dalam melaksanakan tugas di bidang kesetaraan Gender 	Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kelurahan dalam Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 tahun 2012
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM				
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Tidak tersedianya data potensi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kelurahan Pasar Bangko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berjalannya system pelaporan perkembangan Industri Kecil dan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kelurahan dalam Kabupaten

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
				Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 tahun 2012
2	Program pengelolaan kekayaan budaya.	Kurang terfasilitasinya Lembaga Adat Kelurahan	1. Belum disusunnya program kerja Lembaga Adat Kelurahan	1. Telah terbentuknya Lembaga Adat Kelurahan Pasar Bangko 2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kelurahan dalam Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 tahun 2012 untuk melaksanakan pembinaan lembaga adat
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Masih kurangnya fasilitasi terhadap lembaga ekonomi masyarakat di Kelurahan Pasar Bangko	1. Belum terpetakannya lembaga ekonomi masyarakat yang telah ada 2. Belum tergalinya pengembangan lembaga ekonomi masyarakat	
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Kurang terfasilitasinya masyarakat perdesaan untuk	1. Adanya kesenjangan ekonomi masyarakat di	

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		lebih mandiri	perdesaan	
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kelurahan	1. Belum optimalnya Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat	
7	Program peningkatan kapasitas aparatur Kelurahan	Belum berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara optimal	1. Masih rendahnya pengetahuan Pegawai Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya	
8	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kurang terfasilitasinya PKK Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	Minimnya fasilitasi dalam bentuk pembiayaan operasional PKK di tingkat Kelurahan	Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu target sasaran MDGs
MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER				
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Belum berjalannya pembinaan kepemudaan secara optimal	1. Kurang terfasilitasinya Karang Taruna Kelurahan sebagai organisasi kepemudaan dalam melaksanakan kegiatannya	
3	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Factor social budaya masyarakat yang masih berkarakter agraris 2. Terbatasnya personil dan pemahaman aparatur Kelurahan dalam	

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			melaksanakan tugas di bidang kesetaraan Gender	
MISI VI : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN				
1	Program pemberdayaan masyarakat	Belum berjalannya fasilitasi pemberdayaan masyarakat pengelola hutan	1. Belum adanya konsesi hutan desa yang dikeluarkan di wilayah Kelurahan Pasar Bangko	1. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kabupaten Merangin tahun 2014-2034. 2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah dalam Kabupaten Merangian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 tahun 2012
6	Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Belum berjalannya pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1. Kurangnya personil Aparatur Kelurahan untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2. Belum adanya SOP yang	1. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kabupaten Merangin tahun 2014-2034.

VISI : BERBENAH menuju Merangin EMAS.				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			<p> jelas terhadap kewenangan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah </p>	<p> 2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kelurahan dalam Kabupaten Merangin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 tahun 2012 </p>
7	Program Pendampingan Community Social Responsibility	Belum berjalannya koordinasi terhadap program-program CSR di wilayah Kelurahan Pasar Bangko	<p> 1. Kurangnya akses terhadap informasi program CSR 2. Belum berkembangnya sector industry di Kelurahan Pasar Bangko </p>	<p> Adanya pelimpahan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta </p>

1.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi SKPD, telaahan RPJMD Kabupaten Merangin dan Telaahan RT/RW Kabupaten Merangin, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk periode 5 tahun kedepan di Kelurahan Pasar Bangko sebagai berikut:

- 1) Kurangnya personil Aparatur Kelurahan khususnya personil staf pelaksana PNS
 - 2) Minimnya kesempatan personil Aparatur Kelurahan untuk mengikuti bintek, diklat/pelatihan.
 - 3) Masih rendahnya pemahaman pejabat structural Kantor Lurah Pasar Bangko terhadap system pengendalian intern SKPD
 - 4) Masih Minimnya sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur Kelurahan yang tersedia
 - 5) Masih rendahnya disiplin Aparatur Kelurahan
 - 6) Belum optimalnya penyelenggaraan Administrasi Kelurahan di Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko
 - 7) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public di Skpd Kantor Lurah Pasar Bangko
 - 8) Belum berjalannya evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Skpd Kantor Lurah secara mandiri.
 - 9) Belum optimalnya penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD
 - 10) Kurang berjalannya pengendalian internal di Skpd Kantor Lurah
 - 11) Kurang berjalannya pengelolaan arsip di kantor lurah pasar bangko
 - 12) Belum terbangunnya database berbasis wilayah Kelurahan yang baik.
 - 13) Belum berjalannya pemberian informasi kepada masyarakat secara online
 - 14) Belum terbangunnya website Kantor Lurah Pasar Bangko
 - 15) Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan yang dilaksanakan oleh petugas linmas Desa
 - 16) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban
 - 17) Masih Rendahnya Partisipasi Sekolah pada tingkat anak usia Dini di Kelurahan Pasar Bangko
 - 18) Menurunnya semangat gotong royong masyarakat untuk membersihkan rumah dan lingkungannya secara mandiri
 - 19) Tidak terpantaunya kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kelurahan Pasar Bangko
 - 20) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan
-

- 21) Tidak tersedianya data potensi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kelurahan Pasar Bangko
 - 22) Kurang terfasilitasinya Lembaga Adat Kelurahan
 - 23) Masih rendahnya kemampuan Rt secara mandiri mengembangkan sarana dan prasarana permukiman dan lingkungan
 - 24) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa
 - 25) Kurang terfasilitasinya PKK Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK
 - 26) Belum berjalannya pembinaan kepemudaan secara optimal
 - 27) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan
-

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Penetapan visi, misi dan arah pembangunan didasarkan atas kondisi riil, permasalahan, potensi, peluang dan tantangan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan merupakan titik tolak untuk menetapkan prioritas bidang yang dikembangkan ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan visi Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko adalah “ ***Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Melalui Pelayanan Yang Cepat, Akurat dan Ramah Menuju Merangin Emas 2018***. Visi Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi Kabupaten Merangin yakni “***Berbenah Menuju Merangin Emas Tahun 2018***”.

Penjelasan VISI

Prima	: Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal bahkan lebih apa yang diharapkan masyarakat
Cepat	: Melaksanakan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tidak menunda-nunda pelayanan kepada masyarakat
Akurat	: Memberikan layanan kepada masyarakat dengan benar dan memperkecil kesalahan yang timbul
Ramah	: Memberikan layanan kepada masyarakat dengan sabar, menebar senyum dan simpatik

Visi Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko diwujudkan melalui Misi Kelurahan yang meliputi :

1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan keamanan lingkungan

Dengan ditetapkannya misi Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko tersebut diatas, nantinya diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Merangin.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi dngan penjabaran masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1.	MISI 1	:	Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel
	TUJUAN	:	Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel
	SASARAN	:	Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat Daerah

2.	MISI 2	:	Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat
	TUJUAN	:	Terwujudnya pembangunan Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko yang berbasis partisipasi masyarakat
	SASARAN	:	Meningkatnya partipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan

3.	MISI 3	:	Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
	TUJUAN	:	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
	SASARAN	:	Kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

4.	MISI 4	:	Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
	TUJUAN	:	Terwujudnya Lingkungan yang aman dan nyaman di wilayah kelurahan Pasar Bangko
	SASARAN	:	Meningkatnya kemandirian lingkungan yang aman dan nyaman di wilayah kelurahan Pasar Bangko

4.3 Strategi Dan Kebijakan

Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sertarencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategic tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2014-2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat;
 2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan;
 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat;
 4. Meningkatnya Kebersamaan antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.
-

		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah	1.20.36.28.03	Penyampaian DHKP dan SPT PBB	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah														
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah	1.20.36.35	Program peningkatan system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah														

Bertolak dari kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di depan, berikut ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran guna merealisasikan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan dan perlengkapan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Penyediaan jasa pengamanan kantor
 - j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - k. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - l. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
 - m. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

3. Program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kelurahan
 - b. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
 - b. Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
 - c. Penunjang Kegiatan Lembaga Ketahanan Desa/Kelurahan (LKD)
 - d. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat kelurahan
 - e. Pembinaan dan fasilitasi karang taruna
 - f. Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan Paud
 - g. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - h. Peningkatan pelayanan posyandu (sarana dan prasarana)
 - i. Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
 - j. Pembinaan RT RW se Kelurahan
 - k. Pelatihan Penanganan Jenazah
 - l. Pembinaan PKK Kelurahan
 - m. Pembinaan Kelurahan Siaga
 - n. Pembinaan SDM Linmas
 - o. Pembinaan SDM Kader Bina Keluarga Balita dan Paud
 - p. Pelatihan Kerajinan dan Kewirausahaan
 - q. Pembinaan Administrasi Kependudukan
-

BAB VI

RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun kedepan oleh SKPD Kelurahan , disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD, harus juga mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Oleh karena itu tergambar dibawah ini rencana target capaian kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang merupakan tugas dan fungsi SKPD Kelurahan Pasar Bangko.

Tabel 6.1.Rencana Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi I : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas ,transparan dan akuntabel									
1. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah	1. Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.	SIM Kependidikan	0 SIM	1 SIM	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Wajib	Sekretariat
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 orang	4 orang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Sekretariat
				Jumlah Pelanggaran Disiplin oleh Aparatur	15	10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Sekretariat
	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit	Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan dan anggaran berbasis <i>planning-budget dan e-audit</i> .	Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Kali/orang	4 Kali/orang	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Wajib	Sekretariat
				Presentase Pelaksanaan Sistem intern Pemerintah	65%	85%	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	wajib	Sekretariat
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	6 dokumen	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	wajib	Seksi Pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II: Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat									
1. Terwujudnya pembangunan Kelurahan Pasar Bangko yang berbasis partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.	Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah	Menyelenggarakan Pembangunan Yang Partisipatif	Tersedianya dokumen perencanaan yg partisipatif	75%	100%	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Wajib	Sekretariat
				Terlaksananya proses penyusunan perencanaan pembangunan Tepat waktu	60% Tepat Waktu	100% Tepat Waktu	Program perencanaan pembangunan daerah	wajib	Seksi PPKR
MISI III : Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat									
1. Meningkatkan prestasi pemudadan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme	Memperbaiki angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement)	Memperkuat koordinasi dan jaringan pen garusahaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauandanevaluasi	Meningkatnya kapasitas organisasi perempuan (PKK) dalam pembangunan di tingkat kecamatan	0 Organisasi	1 Organisasi	Program peningkatan peran sert adan kesetaraan gender dalam pembangunan	Wajib	Seksi PPKR
2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjagadan melestarikan budaya daerah dan norma Agama	Peningkatan Upaya Pelestarian budaya daerah	Meningkatkan peran Lembaga Adat Kelurahan	Memfasilitasi Lembaga Adat kelurahan dalam melestarikan budaya daerah	Jumlah Kegiatan	0 kegiatan	5 kegiatan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	wajib	Seksi PPKR
3. Meningkatkan kesehatan Ibu dan anak yang terintegrasi dengan Pendidikan anak Usia Dini	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak usia dini di Kelurahan Pasar bangko	Memfasilitasi Kegiatan Posyandu dan PAUD	Jumlah Kegiatan	0 Kegiatan	5 Kegiatan	Program Peningkatan kenerdayaan masyarakat Kelurahan	Wajib	Seksi PPKR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV : Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman di Wilayah Kelurahan Pasar Bangko.	Peningkatan keamanan lingkungan di wilayah Kelurahan Pasar bangko	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan keamanan	Jumlah Pos Kamling di masing-masing RT	5	12	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	wajib	Seksi Trantib dan Pelum

BAB VII PENUTUP

Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD dimana seringkali dijabarkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selalu dibuat setiap tahun disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan. Oleh karena itu hendaknya penyusunan Renja Perangkat daerah dilakukan tidak terpisahkan dengan Renstra-nya. Dengan disusunnya Renja setiap tahun ini, akan lebih jelas melihat jumlah anggaran yang dibutuhkan beserta sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja.

Dengan adanya Renstra Kelurahan Pasar Bangko, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Pasar Bangko akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Kelurahan Pasar Bangko.

LURAH PASAR BANGKO

KIKI YANITA BUDI UTAMA,S.STP

Penata Tingkat I

NIP.19840520.200212.2.001